

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA DIY NO. 11, LD 2023/NO.11, TLD NO.11, 409 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No.13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai: pajak daerah; retribusi daerah; tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; sanksi administratif; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan. Pajak daerah terdiri atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor); PAB (Pajak Alat Berat); PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor); PAP (Pajak Air Permukaan); Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB (Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Adapun Retribusi yang dipungut oleh Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Setiap wajib pajak maupun wajib retribusi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: Perda DIY No. 3 Tahun 2011; Perda DIY No. 11 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda DIY No. 14 Tahun 2019; Perda DIY No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda DIY No. 1 Tahun 2020; Perda DIY No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: Perda DIY No. 3 Tahun 2011; Perda DIY No. 11 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda DIY No. 14 Tahun 2019; Perda DIY No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda DIY No. 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2014, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
 - Penjelasan: 18 hlm.
 - Lampiran: 323 hlm.